

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera
Barat tahun 2016-2019)

SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

AISYAH NUR HIDAYAH

2017/17043001

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA
MODAL DENGAN *BUDGET RATCHETING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

(Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera barat tahun 2016-2019)

Nama : Aisyah Nur Hidayah
NIM/TM : 17043001/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 November 2021

Disetujui Oleh :

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE., M.Si
NIP. 19870515 201012 2 009

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan *Budget Ratcheting* Sebagai Variabel Modeasi (*Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019*)

Nama : Aisyah Nur Hidayah

NIM/TM : 17043001/2017



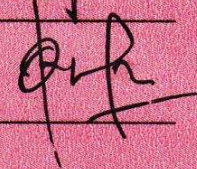
Jurusan : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, 10 November 2021

Tim Penguji:

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Vita Fitria Sari, SE., M.Si	1. 
2	Anggota	Fefri Indra Arza, SE.M.Sc.Ak	2. 
3	Anggota	Halmawati, SE., M.Si	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : Aisyah Nur Hidayah
NIM/Tahun masuk : 17043001/2017
Tempat, tanggal lahir : Sukoharjo, 30 Maret 1999
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintahan
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jln.Bondo No.10, AIR Tawar Barat Padang Utara
No.Hp/Telp : 081374608849
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal dengan budget Ratheting sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun2016-2019)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik(sarjana), baik di UNP maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji, dan ketua jurusan

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan tinggi.

Padang, Desember 2021

Yang menyatakan



Aisyah Nur Hidayah

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI
BELANJA MODAL DENGAN *BUDGET RATCHETING* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI**

**(Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019)**

Aisyah Nur Hidayah

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang

ABSTRACT

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui recheting anggaran dalam APBD pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019. (2) Mengetahui recheting anggaran dalam alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019. (3) Menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019. (4) Menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap alokasi belanja modal dengan moderasi recheting anggaran pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019.

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan moderation regression analysis (MRA). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat ratcheting effect dalam anggaran PAD. Ada efek ratcheting dalam belanja modal. Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Ratcheting anggaran melemahkan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah

Kata kunci : pendapatan asli daerah, ratcheting anggaran, belanja modal

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala Rahmat dan Karunia, serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN BUDGET RATCHETING SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2019)”**. Shalawat beriringkan salam tak lupa penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad Shalallahu'alaihi Wa Sallam yang telah menjadikan suri tauladan bagi manusia untuk menuju kebaikan.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Disamping itu juga untuk memperluas khasanah ilmu pengetahuan untuk menjadikan penulis sebagai orang yang dapat berguna bagi masyarakat. Dalam penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan dorongan serta kemudahan dari berbagai pihak. Penulis secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa penulis persembahkan kepada keluarga tercinta, Abi Muhammad Zuchri, Umi Sri Lestari, Adik-adik : Aulia Rosyidah Amatulloh, Fathimah Az-Zahra, Muhammad Ibrahim Habibie yang

selalu memberikan doa dan support terbaik meskipun kita terpisah pulau. Teruntuk mbah uti dan mbah kakung beserta seluruh keluarga di Bukittinggi yang bersedia memfasilitasi penulis selama mengenyam di bangku kuliah. Semoga Allah membalas dengan pahala dan hal-hal baik yang tidak terhingga.

2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, Bapak Dr. Idris, M.Siserta para wakil dekan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.

3. Ibu Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

4. Bapak Efrizal Syofyan, SE., M.Si., Ak., CA (Pak Ujang) selaku dosen pembimbing akademik dan dosen terbaik yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis, dan telah banyak memberikan nasihat, ilmu, serta banyak membantu dalam hal apa pun selama penulis menjadi mahasiswa. Terimakasih banyak atas segala bantuan bapak, karena beliau adalah penulis menjadi mencintai Akuntansi dan beliau bersedia membantu segala kesulitan penulis dalam bentuk materi maupun non materi. Terimakasih banyak Ujang, semoga pak Ujang selalu dalam keadaan sehat. Aamiin

5. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc. Ak dan ibu Halmawati SE, M.Si selaku dosen penguji penulis

6. Teruntuk sahabat baikku yang selalu menanti kepulangan penulis di Solo : Angga Mahendra, dan Luvia Andriani terimakasih banyak

karena selalu memberikan support meskipun kita jauh. Teruntuk sahabat ku di Padang, Iis Naini, Muarti dan Nuryati Sianipar terimakasih banyak untuk selalu menjadi pendengar dalam berbagai keadaan dan selalu mengingatkan penulis untuk selalu dijalan kebaikan.

7. Teruntuk support system penulis teman berjuang seperbimbangan dalam menyelesaikan skripsi, Muhammad Nur Rafli dan Mariani Terimakasih banyak karena selalu memberikan dukungan dan bantuan saat penulis mengalami kesulitan dalam menulis skripsi. Semoga Allah selalu melindungi kamu.
8. Terimakasih untuk platform Youtube, Tiktok, Instagram, dan WA yang telah memberikan hiburan kepada penulis saat suntuk dan membantu penulis untuk tetap terhubung dengan orang-orang yang belum bisa didekap secara langsung.
9. Teristimewa, terimakasih untuk diri sendiri. Terimakasih karena mau berjuang hingga sekarang.

Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan dari segala pihak Allah SWT balas dengan kebaikan yang berlipat ganda serta bernilai ibadah di sisi-Nya. Penulis berharap penelitian ini bermanfaat bagi peneliti sendiri dan bagi para pembacanya. Penulis menyadari dengan segala kekurangan dan keterbatasan dari penulis, skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi isi maupun

penyajianya.Oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca, penulis ucapkan terimakasih.

Padang, Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	8
A. Latar Belakang Masalah.....	8
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Teori	14
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian.....	50
B. Objek Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian.....	51
D. Populasi dan Sampel	51
E. Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	52
F. Sumber Data.....	53
G. Teknik Pengumpulan Data.....	54
H. Teknik Analisis Data.....	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Gambaran Umum Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat	63

B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	65
C. Hasil Penelitian	74
D. Pembahasan.....	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Keterbatasan.....	95
C. Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai atau berbasis kinerja. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka sistem penganggaran di Indonesia menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja sebagai pengganti dari sistem penganggaran tradisional. Pada sistem penganggaran tradisional, kinerja diukur dari segi input. Hal ini menimbulkan perilaku pegawai yang selalu berusaha menghabiskan anggaran tanpa memperdulikan hasil dan kualitasnya.

Sistem penganggaran berbasis kinerja merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan manfaat yang dihasilkan (Undang-Undang No 17 Tahun 2003). Anggaran Berbasis Kinerja diselenggarakan untuk memperbaiki proses penganggaran di sektor publik. Sistem anggaran berbasis kinerja dianggap lebih tepat karena didasarkan pada prestasi kerja sesuai dengan kriteria pengendalian kinerja dan evaluasi, sehingga terhindar dari duplikasi penyusunan perencanaan kerja dan anggaran.

Sistem penganggaran berbasis kinerja tidak lagi berorientasi pada penyerapan anggaran (*input*) tetapi pada hasil kinerja yaitu *output* dan

outcome anggaran. Sistem penganggaran berbasis kinerja diterapkan pemerintah dalam upaya merespon tingginya tuntutan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik transparansi, dan akuntabilitas publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah untuk dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat dan sistematis. Penyusunan suatu rencana kinerja dalam konteks penyusunan anggaran berbasis kinerja berkaitan erat dengan rencana strategis (renstra). Rencana strategis (renstra) merupakan kegiatan yang menunjukkan dimana 3 suatu organisasi berada, arah kemana organisasi harus menuju dan bagaimana cara (strategi) yang digunakan untuk mencapai tujuan. Renstra pemerintah daerah disusun untuk digunakan selama periode lima tahun.

Proses penyusunan anggaran berbasis kinerja dimulai dari dilakukannya perencanaan atas kinerja yang akan dicapai, dimulai dari tataran jabatan tertinggi sampai dengan terendah yang ada pada suatu kementerian atau lembaga. Perencanaan kinerja memuat tentang komitmen kinerja yang hendak dihasilkan serta dipertajam dalam program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satuan waktu tertentu. Selain pengajuan rencana kinerja, kementerian atau lembaga juga diharuskan untuk membuat kerangka kebutuhan pendanaan yang diperlukan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada pada organisasi tersebut sesuai dengan alokasi serta target yang telah ditetapkan sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAK/L) yang nantinya dibahas oleh DPR RI sebagai usulan resmi pemerintah atau RAPBN (Kuncoro Adhi, Abdul Hakim, 2019). Agar penerapan PBK dapat dilaksanakan secara penuh,

diperlukan adanya 3 komponen utama yang harus tersedia. Pasal 7 ayat (2) PP Nomor 21 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja diperlukan adanya 3 hal yaitu: indikator kinerja; standar biaya; dan evaluasi kinerja dari setiap program dan jenis kegiatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Belanja daerah terbagi atas: belanja langsung dan tidak langsung. Belanja langsung diharapkan meningkat setiap tahun dan harus lebih besar dari belanja tidak langsung. Besarnya alokasi belanja langsung khususnya belanja modal menurut Halim dan Damayanti (2007) dirasa mampu memberikan pengaruh langsung pada kepentingan publik, mampu menggerakkan perekonomian masyarakat serta mampu mendorong terciptanya efisien dan efektif. Sebagai bentuk investasi pemerintah, belanja modal diarahkan untuk pembangunan sarana dan prasarana utama bagi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat dan bentuk pelayanan kepada masyarakat (Muhardi, 2006)

Belanja modal merupakan faktor yang sangat penting dalam membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam APBD mengalokasikan biaya belanja modal untuk memperbanyak aset tetap. Biaya modal dialokasikan berdasarkan keperluan masyarakat akan fasilitas, untuk kelancaran fasilitas publik atau pelaksanaan tugas pemerintahan.

Rendahnya belanja modal dapat mempengaruhi kinerja berbagai badan pemerintah. Belanja modal merupakan faktor penting dalam meningkatkan perekonomian, sehingga perlu intervensi layanan pemerintah mencakup rendahnya tingkat pencairan anggaran. Potensi keuangan daerah yang tidak sama menimbulkan adanya alokasi biaya modal yang berbeda pada tiap-tiap kabupaten kota. Data porsi dari realisasi belanja modal terhadap total belanja seluruh Pemerintahan Daerah yang ada di Sumatera Barat Tahun 2016 – 2019 terlihat seperti tabel berikut.

Tabel I.1. Porsi Belanja Modal terhadap Total Belanja APBD Sumatera Barat
Tahun 2016 - 2019

No.	Pemda	2016	2017	2018	2019
1	Kab. Kepulauan Mentawai	31.1%	34.9%	28.3%	34.6%
2	Kab. Solok Selatan	31.7%	31.7%	24.9%	27.2%
3	Kota Bukittinggi	12.8%	19.4%	25.2%	26.3%
4	Kota Pariaman	30.3%	28.0%	24.4%	25.8%
5	Kab. Dharmasraya	33.0%	32.8%	27.3%	25.0%
6	Kab. Pasaman Barat	27.0%	25.8%	30.0%	24.4%
7	Kab. Sijunjung	29.4%	24.3%	24.3%	23.3%
8	Kota Payakumbuh	21.8%	25.5%	20.9%	22.8%
9	Lab. Pesisir Selatan	22.0%	20.0%	19.0%	225.0%
10	Kab. Padang Pariaman	25.2%	29.3%	21.4%	20.9%
11	Kota Padang	18.8%	19.2%	19.3%	20.9%

12	Kab. Agam	15.7%	21.7%	17.1%	20.9%
13	Kab. Lima Puluh Kota	21.9%	16.8%	18.4%	20.7%
14	Kota Solok	24.8%	25.2%	24.6%	18.9%
15	Prov. Sumatera Barat	27.0%	16.9%	20.1%	18.8%
16	Kab. Tanah Datar	17.0%	19.0%	15.8%	17.7%
17	Kab. Solok	19.4%	19.7%	16.2%	17.4%
18	Kota Sawahlunto	24.5%	23.7%	15.0%	17.1%
19	Kota Padang Panjang	26.8%	35.0%	20.4%	16.4%
20	Lab. Pasaman	25.2%	20.5%	15.4%	13.5%
	Rata-rata	24.3%	24.5%	21.4%	31.9%

Sumber: Kajian Fiskal Regional Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata Porsi Belanja Modal terhadap Total Belanja APBD Sumatera Barat Tahun 2016 sebesar 24,3%, tahun 2017 sebesar 24.5%. tahun 2018 sebesar 21.4%, dan tahun 2019 sebesar 31.9%.

Dalam upaya pemda membangun daerah dan meningkatkan pelayanan publik, pemda menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber yang terdapat pada daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di Indonesia, PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan

kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang menjadi sumber PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang kuat, sehingga kebijakan penggunaannya untuk belanja modal juga tergantung pada PAD pemerintah daerah. Oleh karena itu, PAD diduga dapat mempengaruhi belanja modal. Penelitian Neni (2018) menemukan adanya hubungan positif antara varians anggaran (perbedaan antara pendapatan aktual dan pendapatan yang dianggarkan) periode berjalan dengan anggaran periode berikutnya. Penggunaan varians ini sebagai dasar dalam penetapan target selanjutnya disebut *budget ratcheting* (Lim, 2011). *Budget ratcheting* menunjukkan bahwa peningkatan anggaran pendapatan periode berikutnya cenderung lebih responsif terhadap varian anggaran pendapatan periode berjalan dibandingkan penurunan pendapatan pada periode berikutnya sebagai berpengaruh negatif terhadap perubahan anggaran periode berjalan. Artinya, kekurangan dalam pendapatan periode berjalan tidak terkait dengan tinggi rendahnya pendapatan di masa mendatang.

Konsep *budget ratcheting* memiliki makna adanya asimetri informasi tentang kemampuan (potensi) bawahan di antara atasan/manajer dengan bawahannya, sehingga manajer menggunakan kinerja sebelumnya untuk memperbarui target kinerja masa depan (Weitzman, 1980). Artinya, anggaran akan “*ratchet*” ke arah kinerja sebelumnya, dimana varian yang “menguntungkan” akan diikuti oleh standar kinerja yang lebih tinggi, sedangkan varian tidak menguntungkan akan diikuti oleh standar kinerja yang

lebih rendah, hal ini sangat dimungkinkan mempengaruhi besar kecilnya belanja modal.

Tahap awal penganggaran sudah terjadi beberapa permasalahan, diantaranya etika penyusunan anggaran muncul kecenderungan penyusun untuk mengambil keputusan menggunakan kinerja saat ini sebagai kriteria dalam menentukan target dimasa depan, dimana hal tersebut disebut dengan *ratchet* (Weitzman, 1980). *Ratchet* tersebut akan memperlihatkan terjadi teori agensi pada pelaksanaannya, teori agensi menjelaskan terjadinya kesepakatan antara dua pihak, yaitu pihak yang memberikan wewenang disebut *principal* dan pihak yang menerima wewenang disebut dengan *agent* (Halim dan Abdullah, 2006). Hubungan tersebut akan menimbulkan permasalahan yaitu adanya asimetri informasi, dimana pihak pemerintah sebagai *agent* memiliki informasi yang lebih daripada pihak *principal* (masyarakat).

Nurhayati (2018) menyatakan bahwa *budget ratcheting* pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah dalam memperbaiki dan merevisi pencapaian target guna memperoleh gambaran kinerja di masa lalu. *Budget ratcheting* juga merupakan sebuah kecenderungan dalam pembuatan perencanaan guna menentukan tujuan dimasa depan dengan menggunakan kinerja saat ini. Abdullah & Junita (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa *budget ratcheting* menjadi variabel moderasi dalam hubungan pendapatan asli daerah dengan belanja daerah, dan ketika penyusunan anggaran dilakukan disertai dengan masalah keagenan yang disusun oleh pengusul anggaran dan pemberi persetujuan yang memiliki kepentingan

masing-masing. Penelitian Annisa (2020) menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh *ratcheting* anggaran pada pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengaruh penerimaan daerah terhadap belanja daerah dan anggaran *ratcheting* memperlemah hubungan keduanya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP No. 58 Tahun 2005 tersebut pengelolaan keuangan daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah termasuk dalam menetapkan alokasi belanja modal. Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang menghasilkan aktiva tetap tertentu. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal merupakan angka yang memberi gambaran tentang upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pembangunan daerahnya. Pertumbuhan ekonomi yang selama ini terjadi selama ini sangat ditentukan oleh faktor belanja pembangunan daerah. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan dapat menjadi daya tarik bagi investor (Priyo Hari Adi, 2006).

Penelitian terkait dengan pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Budget Ratcheting* Terhadap Alokasi Belanja Modal pernah dilakukan oleh (Misra, 2020), hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi perilaku *ratcheting* dalam penyusunan anggaran pemerintah daerah. Wilayah yang menerapkan ASE menunjukkan tingkat anggaran yang jauh lebih kecil *ratcheting* daripada

wilayah tanpa ASE. Penelitian (Abdullah dan Junita, 2016), menyatakan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah, dan *Budget Ratcheting* memoderasi hubungan pendapatan sendiri dengan belanja daerah. Hasil ini sependapat dengan (Sugiarti dan Supadmi, 2014), dan (Jaya and Dwirandra, 2014). Sedangkan hasil penelitian yang berbeda ditemukan oleh (Erdi Adyatma, 2015), (Nurin Hidayati, 2016), (Agus Budi Santosa dan Mohamad Ainur Rofiq, 2013), dan (Arbie, 2013) yang menemukan bahwa Pendapatan asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian terkait dengan pengaruh *Budget Ratcheting* terhadap alokasi belanja model telah dilakukan oleh (Marlina, 2018), hasil penelitian menunjukkan bahwa *Budget Ratcheting* berpengaruh positif terhadap belanja model.

Penelitian mengenai *budget ratchet* dalam penganggaran organisasi sektor publik telah dilakukan dengan berbagai konteks. Penelitian (Lee, T., & Plummer, 2007) menjelaskan adanya *efek ratchet* dalam anggaran sekolah di Texas. (Abdullah, S. & Afrah, 2016) menemukan bahwa *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara pendapatan sendiri dengan belanja daerah dalam studi yang dilakukan di pemerintah kabupaten/kota di Aceh, Indonesia.

Sejalan dengan tujuan penelitian, adanya *budget ratcheting* tentunya juga berkaitan dengan hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Penelitian Nurhayati (2018) menemukan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja daerah yang disebabkan karena adanya varians anggaran dari tahun sebelumnya yang terjadi pada wilayah Cirebon. Penelitian

Andrian & Sari (2020) menemukan bahwa adanya *budget ratcheting* dalam memengaruhi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah. Beberapa penelitian tersebut belum membahas secara rinci mengenai terjadi atau tidaknya *budget ratcheting* dalam setiap anggaran pada pos-pos APBD. Maka, penelitian ini akan menjelaskan secara deskriptif mengenai bagaimana *budget ratcheting* dalam penganggaran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja modal.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu dari seluruh pemerintah daerah di Indonesia yang menunjukkan pencapaian yang baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan dilakukannya berbagai pembangunan baik dalam bentuk sektor pariwisata daerah dan sektor publik lainnya (Annisa, 2020). Hal ini tentu sesuai dengan tujuan penelitian mengetahui *efek budget ratcheting* dalam penganggaran pemerintah dengan penerapan anggaran berbasis kinerja yang terjadi pada Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal.

Penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Budget Ratcheting* Terhadap Alokasi Belanja Modal pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya: (1) Neni (2018) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon” (2) Vinna et.al (2020) dalam judul penelitian *Efek Ratchet* terhadap Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Se Sumatera. (3) Penelitian

Annisa dan Vita (2020) dengan judul penelitian: Efek *Budget Ratcheting* Pada Anggaran Pemerintah kabuptan/kota provinsi Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan *Budget Ratcheting* Terhadap Alokasi Belanja Modal perlu dilakukan di pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat khususnya tahun 2016-2019, dalam sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal Dengan *budget ratcheting* sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terjadi *budget recheting* dalam anggaran pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?
2. Apakah terjadi *budget recheting* dalam alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?

3. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?
4. Apakah *budget recheting* memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui *budget raching* dalam anggaran pendapatan asli daerah di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.
2. Untuk mengetahui *budget raching* dalam alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.
3. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.
4. Untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal dengan moderasi *budget raching* di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2019.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam hal pengembangan wawasan terkait dengan pendapatan daerah dan belanja modal dan *Budget Ratcheting* pada pemerintah daerah serta sebagai ajang ilmiah dalam penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan di lapangan.

2. Bagi Pemerintah DaerahDaerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pentingnya mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk peningkatan kualitas pelayanan publik demi kemajuan daerah.